

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi dewasa ini telah menjadi masalah global antar negara, yang tergolong kejahatan transnasional bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar, maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra-ordinary crime* sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia (Hamzah, 2007:89).

Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak ada jalan pintas untuk memberantasnya dan tidak ada jawaban yang mudah. Korupsi, seperti yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat, tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak dasar kemerdekaan, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tingginya angka korupsi di Indonesia telah menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara rusak karena praktik korupsi telah berlangsung secara merata dan membuat larut hampir semua elit politik. Jika dibiarkan terus berlangsung dan tanpa tindakan tegas, korupsi akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam bahaya kehancuran (Sudarto, 2008: 116).

Di tingkat regional Asia dan Asia Pasifik, Indonesia selalu menduduki peringkat teratas sebagai negara paling korup. *Political and Economy Risk Consultancy* (PERC), sebuah lembaga konsultan independen yang berbasis di Hongkong, menempatkan Indonesia pada posisi sebagai negara juara korupsi di Asia selama sepuluh tahun lebih secara berturut-turut.

Pada tahun 2006, Indonesia memiliki skor 8,16 yang berarti skor tertinggi yang mendekati angka sempurna sebagai negara paling korup di Asia. Data PERC menyebutkan bahwa selama 10 tahun lebih, sejak 1997-2006, dan hingga 2011, tingkat korupsi di Indonesia tidak mengalami perbaikan secara signifikan. Indonesia selalu berada pada peringkat teratas dalam praktek korupsi, sehingga selalu berada di atas rata-rata korupsi negara-negara lain. ([http://nasional.kompas.com/read/2012/02/05/23125634/Tiga.](http://nasional.kompas.com/read/2012/02/05/23125634/Tiga.Besar.Sektor.yang.Rugikan)

[Bes. Sektor. yang. Rugikan](#) Negara.akibat.Korupsi diakses 14 April 2014).

Korupsi tampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Korupsi dapat tumbuh subur di Indonesia memiliki banyak penyebabnya. Salah satunya ialah kesejahteraan masyarakat yang kurang, hal ini disebabkan oleh gaji dan pendapatan yang rendah dan mental orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. Budaya di Indonesia sendiri yang masih *money oriented* menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya. Ditambah lagi sistem birokrasi Indonesia yang merupakan warisan budaya kolonial Belanda yang rumit membuka celah-celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktik korupsi. Apalagi kini nilai-nilai agama yang semakin luntur membuat banyak orang mudah tergiur dengan praktik korupsi. Hal yang paling dirasakan oleh rakyat adalah kemampuan negara semakin terbatas dalam hal menyediakan anggaran demi kepentingan rakyat, khususnya yang dirasakan secara langsung. Antara lain, adalah perbaikan infrastruktur, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi dan pelayanan masalah kesejahteraan rakyat yang lainnya, seperti penanganan bencana, bantuan bagi keluarga miskin dan anak terlantar, dan lain-lain (Saleh, 1998:97)

Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian negara kita. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan

rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya, walaupun ada realisasinya tentunya tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak buktinya, jelas ini merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak jelasnya pembangunan fasilitas-fasilitas publik ini nantinya akan memberi efek domino yang berdampak sistemik bagi publik, yang dalam ini adalah masyarakat. Contoh kecilnya saja, jalan-jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan mengakibatkan susahny masyarakat dalam melaksanakan mobilitas mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi akibat dari korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang dan jasa sebagai salah satu contohnya.

Terhambatnya segala macam pembangunan dalam sektor-sektor publik, Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan optimal lagi. Segala macam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dibuat pemerintah akan menjadi sia-sia hanya karena masalah korupsi. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang - orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Menurunnya kualitas pelayanan pemerintah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang dapat membuat masyarakat menjadi marah. Pada tahun 1998 pun kerusuhan yang ada di dipicu oleh masalah ekonomi, yakni krisis moneter yang jika dikaji penyebabnya ialah karena masalah korupsi. Bukan hal tersebut akan terulang jika korupsi masih merajalela dan pemerintah tidak menanggapi masalah ini dengan serius (Tanthowi, 2005:47)

Kalau dari pemerintah yang merupakan tempatnya koruptor, mereka pasti akan memindahkan uang-uang hasil korupsi yang mereka dapatkan ke rekening di bank-bank

negara asing. Padahal uang tersebut seharusnya merupakan uang negara yang akan diinvestasikan di negara ini dan mereka malah membawa uang tersebut ke luar negeri. hal ini akan membuat pembangunan ekonomi menjadi tersendat tentunya. Dengan korupsi juga, pemerintah tidak akan lagi pro kepada masyarakat. Mereka akan pro kepada para pengusaha kotor yang memberi suap.

Korupsi menimbulkan berbagai kerugian-kerugian yang mesti di tanggung oleh negara bukan hanya dari segi keuangan negara juga merugikan jalannya pemerintahan terutama daerah pemerintahan yang menjadi basis dimana korupsi itu dilakukan, korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi (Frederickson, 1994:82).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Kantor Bupati Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten yang tertinggal dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo hal ini disebabkan karena korupsi dengan tersangka Ismet Mile seperti kasus Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2003, kasus proyek fasilitas penunjang objek wisata lombongo 2003 dan proyek Kantor Bupati sebanyak Rp 7 M, kasus Pengadaan ternak sapi melalui dana Hibah Bone Bolango sejumlah 5000 ekor Rp 25 M, kasus proyek pengendalian banjir di Bone Bolango sebesar Rp 5,1 M tahun 2008, kasus pungutan liar

dengan nama tersangka Rustam Anwar Rp 84 juta tahun 2010 dan Kasus Raskin Rp 150 juta dengan tersangka Idris Matihu tahun 2010 ini dilakukan sudah menjadi kebiasaan Bupati pada instansi-instansi di Kabupaten Bone Bolango sehingga menimbulkan dampak yang begitu kuat dalam kelancaran menjalankan pemerintahan di daerah ini karena besarnya dampak yang di timbulkan oleh korupsi di dalam proses pemerintahan di Bone Bolango, akibat korupsi adalah menyebabkan ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing untuk menanam investasi di daerah, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif di Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “ *Dampak Korupsi Dalam Proses Pemerintahan Daerah di Bone Bolango Periode 2005-2010* ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak korupsi dalam proses pemerintahan daerah di Kabupaten Bone Bolango periode 2005-2010?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk memberantas dampak korupsi dalam proses pemerintahan daerah di Kabupaten Bone Bolango periode 2005-2010?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak korupsi dalam proses pemerintahan daerah di Kabupaten Bone Bolango periode 2005-2010 .

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk memberantas dampak korupsi dalam proses pemerintahan daerah di Kabupaten Bone Bolango periode 2005-2010.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman dalam menambah wawasan pengetahuan dan dapat memperoleh pengetahuan tentang dampak dampak korupsi dalam proses pemerintahan daerah di Kabupaten Bone Bolango periode 2005-2010.

- b. Bagi masyarakat. Sebagai sarana untuk menyadarkan masyarakat tentang dampak buruk yang timbulkan bilamana melakukan tindakan korupsi.

- c. Bagi lembaga

Sebagai bahan kajian dan bahan informasi untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pengembangan melalui lembaga tempat studi penulis dan Sebagai bahan rujukan kepada seluruh insan pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango periode 2005-2010 untuk melakukan upaya yang lebih konkrit dalam mencegah terjadinya korupsi di Kabupaten Bone Bolango.